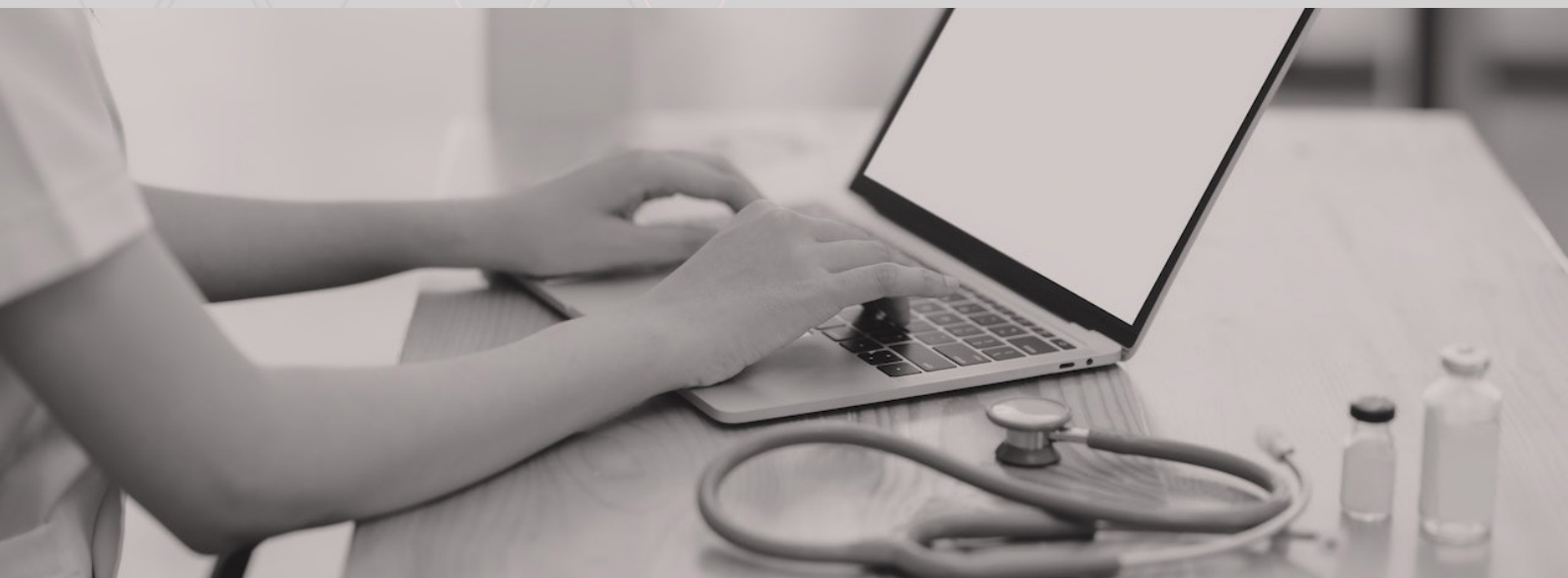


OPEN
RESPONSE + OPEN
RECOVERY

Open Service Delivery in Health - Communities and Governments Working Together



Sumber Foto: Pexels.com

Serial webinar OGP kali ini mengusung tema keterbukaan pelayanan yang khusus membahas tentang kerja sama pemerintah dengan komunitas dalam masa pandemi COVID-19. Dalam masa krisis, akses terhadap pelayanan publik yang luas, efisien, dan tepat waktu bagi mereka yang paling membutuhkannya menjadi prioritas utama. Salah satu kebutuhan mendesak yang dirasakan di masa pandemi ini adalah mengembangkan kerangka kerja kolaboratif antara pemangku kepentingan multipihak. Webinar kali ini menghadirkan berbagai tanggapan mengenai perawatan kesehatan, peran, sinergi dan tantangan untuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan aktor lainnya dalam membentuk, memberikan dan memantau layanan

publik bersama di saat darurat.

Aidan Eyakuze, Direktur Eksekutif, Twaweza dan Anggota Steering Committee OGP, membuka webinar dengan menyatakan bahwa krisis ini dapat menjalar ke aspek ekonomi dan sosial. Penting untuk membicarakan mitigasi dan upaya pencegahan dalam sektor tersebut. Selain itu, hal lain yang juga penting adalah adanya kolaborasi dalam memberikan layanan kesehatan yang terbuka.

Luz Calolot-Illagan, Wakil Menteri Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Filipina menyampaikan mengenai keadaan di negaranya saat ini. Pemenuhan nutrisi ibu dan anak menjadi salah satu prioritas. Hal ini terkait dengan masalah kekurangan



gizi yang menjadi masalah yang belum terpecahkan karena belum ada perbaikan yang signifikan. Sedangkan dalam masa pandemi, isu tersebut akan menjadi lebih parah karena kondisi yang tidak mendukung untuk perbaikan. Pemerintah pun menjadikan masalah ini sebagai darurat sosial dan memberlakukan berbagai program untuk membantu ibu dan anak dalam mengatasi pola makan yang buruk.

Dalam hal kolaborasi dengan masyarakat sipil, Pemerintah Filipina melakukan penelitian partisipatif dimana masyarakat dapat mendefinisikan masalah dan mengusulkan solusi kepada pemerintah. Hasil temuan menunjukkan masalah malnutrisi mengancam negara terlebih karena COVID-19. Saat ini, pemerintah mempromosikan program nutrisi yang baik, khususnya untuk masyarakat miskin di daerah pedesaan yang mengalami kesulitan. Beberapa provinsi mempunyai inisiatif untuk membuat bank makanan yang menargetkan para ibu menyusui, anak dan bayi.

John Maritim, Direktur Perencanaan Ekonomi Pemerintah Munisipal Elgeyo-Marakwet mengulas keadaan di Kenya. Ia menjelaskan komitmen rencana aksi keterbukaan pemerintah saat ini yang berfokus pada rekayasa ulang layanan kesehatan dan sanitasi. Tujuan dari komitmen ini di masa lalu adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara lokal. Namun, saat ini Pemerintah Kenya mengalami permasalahan terkait ketersediaan dan pengadaan obat, dimana sebagian besar fasilitas kesehatan tidak memiliki obat-obatan yang dibutuhkan. Pemerintah bersama

dengan CSO kemudian berkolaborasi untuk membantu renaksi dalam pemenuhan obat-obatan secara akurat dan tepat waktu.

Jason Lawson, Public Health Agency, Pemerintah Kanada, mengatakan bahwa sekarang negaranya berfokus untuk memberdayakan warga negara dengan memberikan data yang dapat dipahami dengan mudah. Dengan membuka data dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, upaya ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan data yang dapat digunakan oleh pemerintah maupun industri swasta secara kolektif. Dengan mekanisme *crowdsourcing*, partisipasi publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengambilan data dari berbagai sumber.

Dalam sesi kedua pada diskusi terbuka, pertanyaan mengenai kolaborasi pemerintah, publik dan swasta menjadi topik utama. **Florencia Guerzovich**, Politeia Group, Santa Catarina State University, menyatakan pentingnya untuk berinvestasi pada relasi dan hubungan yang baik antara semua pihak untuk dapat mengubah dan mengembangkan ide dan bersinergi. Pentingnya kerja sama yang baik harus didasari pada pola pikir bahwa kesejahteraan dan keberlangsungan makhluk hidup adalah urusan semua orang.

George Osei-Bimpeh, Country Director, SEND-Ghana, juga menyatakan hal yang senada dimana investasi pada kemitraan sangat penting. Di Ghana, banyak keraguan mengenai social distancing karena minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. SEND-Ghana bergerak dalam penelitian kebijakan & advokasi organisasi



masyarakat sipil yang memberikan keterampilan kepada masyarakat terkait akuntabilitas. SEND-Ghana berupaya membangun relasi antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik.

Sesi ketiga webinar ini membahas mengenai keadaan setelah COVID-19. **Besinati Mpepo**, Direktur Teknis-Akuntabilitas Sosial, di World Vision International, menyampaikan pentingnya usaha pencegahan dan identifikasi dampak sekunder yang mempengaruhi anak-anak. Indonesia telah menunjukkan penerapan sistem kesehatan dengan akuntabilitas sosial. Namun, dengan pandemi ini, banyak sistem yang perlu diubah dan lebih kontekstual. Kontekstual disini meliputi informasi mengenai, (1) memastikan masyarakat lokal memahami layanan akses yang menjadi hak mereka, (2) peta hak masyarakat, seperti di Filipina, dimana adanya kejelasan mengenai siapa yang dapat menerima hak dan apa yang diberikan, (3) “umpan balik” yang penting untuk memungkinkan inovasi dan komunikasi dua arah, (4) pengaktifan komunikasi bagi komunitas akuntabilitas sosial untuk bertukar informasi dan bantuan dalam mendistribusikan kembali sumber daya. Di sini, kita akan melihat bahwa jika komunitas lokal menjadi bagian dari proses, masyarakat bekerja bersama pemerintah untuk memastikan hubungan tidak terputus dalam proses pemulihan.

Jeff Thindwa dari Global Partnership Social Accountability menyuarakan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada memberdayakan hak publik dengan memberikan akses

informasi dan dengan melibatkan mereka dalam proses pemulihan dan upaya penanganan COVID-19. Ia juga melihat bahwa rencana aksi nasional keterbukaan pemerintah akan berubah banyak karena pandemi ini. **Bestinati** menambahkan pentingnya OGP belajar dari proses ini dan bagaimanahalini dapat memengaruhi komitmen di masa depan. **Agustin Carrizosa** dari Center of Information and Resources for Development (CIRD) Paraguay menyampaikan sisi positif mengenai meningkatnya upaya kolaborasi. Keinginan publik dalam menuntut informasi lebih lanjut menjadi tantangan bagi pemerintah. Sekarang pemerintah harus lebih transparan dan tidak tercerai berai dengan agenda politik.

Untuk informasi lebih jauh mengenai kampanye **Open Response + Open Recovery** dapat mengunjungi website www.opengovpartnership.org

